



Analisis Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Desa di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

Deri Ciciria^{a, 1*}, Lian Ferliana^{b, 1}, Wellfarina Hamer^{b, 2}

^a STKIP PGRI Bandar Lampung, Indonesia

^b IAIN Metro, Indonesia

¹ cici201528@gmail.com; lianferliana18@gmail.com; wellfarinahamer@metrouniv.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 8 Februari 2021 Revisi : 5 Maret 2021 Dipublikasikan : 30 Juni 2021	<i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa di desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Wonosari dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi, dan kurangnya keterbukaan antara pemerintah desa kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk resolusi konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat yaitu melakukan negoisasi. Pada proses negoisasi ini pemerintah desa menyampaikan dan menjelaskan secara jelas dan mendalam tentang perbaikan saluran air tersebut yang disampaikan kepada kader serta pamong desa, kemudian kader dan pamong desa ini menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat.</i>
Kata kunci: Konflik Sosial Masyarakat Pemerintah Desa	ABSTRACT <i>This study aims to determine the results of the conflict analysis between the community and the village government in Wonosari Village, Pekalongan District, East Lampung Regency. The research method used is descriptive qualitative research methods. The data validity technique used source triangulation. The results showed that the conflict between the village government and the community in Wonosari Village was motivated by various factors such as lack of socialization, lack of communication, and lack of openness between the village government and the community. Efforts made for conflict resolution between the village government and the community were negotiating. In this negotiation process the village government conveyed and explained clearly and in depth about the repair of the water channel which was conveyed to the village cadres and civil</i>
Keywords: Social Conflict Community Village Government	

servants, then these village cadres and civil servants conveyed and explained to the community.

Copyright © 2021 (Deri Ciciria, dkk.) All Right Reserved

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, dengan keanekaragaman yang tersebar di seluruh wilayah. Manusia dalam kehidupan sehari-hari berada dalam satu komunitas yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam komunitas tersebut diharapkan dapat menciptakan kerukunan hidup di antaranya; kehidupan berkeluarga, beragama, dan bermasyarakat serta menghindarkan diri dari konflik.

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama, keanekaragaman secara vertikal yang ditandai dengan adanya stratifikasi sosial di masyarakat, hal ini biasanya berindikator pada status sosial, kekayaan, dan lain-lain. Kedua, keanekaragaman masyarakat yang dipandang secara horizontal yang ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial yang sederajat satu sama lain, hal ini biasanya di lihat berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, agama, dan ras (SARA). Beranekaragam suku bangsa, agama, dan ras di provinsi Lampung tentu saja juga membawa perbedaan cara-cara hidup atau kebudayaan yang ada di dalamnya. Hal tersebut mencerminkan differensiasi antar suku bangsa tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat.

Keanekaragaman masyarakat di Lampung terutama disebabkan oleh program kolonisasi yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda sejak 1905, dan setelah Indonesia merdeka dilanjutkan melalui program transmigrasi sampai tahun 1989. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan jumlah penduduk dan pemerataan pembangunan yang terpusat di pulau Jawa, oleh karena itu para kolonis atau transmigran mayoritas berasal dari Jawa Barat (suku Sunda), Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Yogyakarta (suku Jawa) dan Bali (suku Bali) yang didistribusikan keseluruh penjuru provinsi Lampung (Sabaruddin, 2013). Kesuburan tanah dan beragamnya iklim ditunjang dengan topografi daerah yang baik dan sangat cocok untuk bercocok tanam kian menjadikan Lampung menjadi objek perantauan daerah-daerah lain di Indonesia yang dilakukan secara mandiri. Maka wajar saja bila saat ini di provinsi Lampung dihuni oleh berbagai macam suku dan agama.

Pada satu sisi, interaksi sosial antar masyarakat yang berbeda SARA di Lampung membawa dampak yang positif. Interaksi yang intensif terjadi baik di lembaga pemerintahan desa, lembaga pendidikan, organisasi sosial, lingkungan masyarakat dan di tempat-tempat ibadah memicu perubahan sikap dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga terjadi

asimilasi dan akulturasi budaya. Hal ini berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat yang bergeliat guna menunjang pembangunan daerah. Contoh sederhananya adalah banyaknya suku Jawa, Bali dan Sunda pandai berbahasa Lampung atau sebaliknya, membuat jaringan sosial-ekonomi lebih mudah yang kemudian akan menimbulkan kepentingan saling membutuhkan. Pernikahan antar suku dan agama yang terjadi juga akan membuat ikatan persaudaraan melampaui batas keanekaragaman suku dan agama, bahkan hingga dalam hal masakan pun berdampak pada munculnya rumah makan yang menonjolkan mixing kekhasan masing-masing daerah.

Pola ketergantungan dalam interaksi sosial harus diimbangi rasa saling tulus dan ikhlas bertoleransi terhadap perbedaan yang ada, Karena apabila toleransi diabaikan maka yang terjadi adalah sebaliknya yaitu konflik. Toleransi akan mencegah prasangka-prasangka sosial antar kelompok yang berkepanjangan dan berlarut-larut tanpa disertai pembuktian yang riil. Tidak ada batas pasti sampai dimana toleransi itu dapat dilaksanakan, yang jelas bahwa toleransi akan hancur oleh akumulasi konflik-konflik sederhana yang semakin membawa corak kelompok/golongan.

Hakikatnya manusia perlu berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika interaksi ini semakin intens dilakukan dan melibatkan subjek yang banyak maka terbentuklah satu wadah yang disebut masyarakat. Masyarakat adalah akumulasi interaksi yang individu dalam satu kesatuan hidup yang memiliki tata aturan walaupun itu sederhana. Interaksi ini bersifat kontinyu dan kemudian menjelma menjadi suatu ikatan rasa identitas yang sama (Koentjaraningrat, 1990) . Interaksi yang terjadi di masyarakat tidak hanya sekali atau dua kali dilakukan, namun terus menerus secara berkelanjutan. Di dalam masyarakat juga terdapat hukum yang mengatur interaksi antar individu dimana satu sama lain sehingga membuatnya memiliki visi dan tujuan yang sama.

Soekanto menambahkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat jika telah memenuhi unsur-unsur antara lain:

1. Kehidupan bersama. Untuk dikatakan masyarakat maka sekelompok orang harus memiliki kesatuan wilayah tempat tinggal.
2. Waktu interaksi yang lama. Interaksi yang terjadi antar individu harus terjalin dengan waktu yang lama agar tercipta kebiasaan yang disepakati.
3. Kesatuan. Sekelompok orang harus memiliki ikatan saling ketergantungan agar setiap orang dalam kelompok merasa saling membutuhkan
4. Sistem. Agar kehidupan bersama teratur maka perlu suatu tata aturan yang mengikat serta untuk menimbulkan rasa saling percaya (Soekanto, 2006).

Berkaitan dengan integrasi, integrasi sosial dapat terjadi melalui beberapa proses-proses antara lain :

1. Asimilasi (assimilation), merupakan proses sosial untuk mengurangi perbedaan-perbedaan sosial di masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain:
2. Adanya toleransi melalui proses akomodasi.
3. Adanya pengakuan yang sama.
4. Adanya sikap saling menghargai antar individu atau kelompok lain.
5. Adanya sikap terbuka.

Akulturasinya, merupakan proses terintegrasinya unsure kebudayaan asing tanpa mengakibatkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan asing akan relatif dapat di terima apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak ada hambatan geografis yang mengurangi intensitas interaksi sosial.
2. Kebermanfaatan kebudayaan asing
3. Adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan lama
4. Adanya kesiapan pengetahuan dan ketrampilan tertentu
5. Kebudayaan itu bersifat kebendaan (Maryati dan Suryawati, 2006)

Adapun faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi dalam sebuah komunitas masyarakat, antara lain :

1. Homogenitas, semakin homogen suatu kelompok maka akan semakin secepat integrasi terwujud, begitu juga sebaliknya .
2. Banyaknya kelompok, semakin banyak kelompok maka akan semakin lambat proses adaptasi, asimilasi dan akuturasinya, begitu juga sebaliknya.
3. Mobilitas, semakin intens mobilitas masyarakat maka semakin lambat proses integrasi terwujud, begitu juga sebaliknya.
4. Efektifitas komunikasi, semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai (Maryati, 2008).

Konflik merupakan kebalikan dari proses integrasi, hal ini terjadi karena terjadinya pertentangan dan persinggungan pihak-pihak yang berkepentingan. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas . Dalam berbagai kasus konflik SARA khususnya di provinsi Lampung, sering kali ditekankan bahwa penyebab pertentangan dan persinggungan itu dikarenakan perbedaan tingkatan ekonomi, pola pikir dan pola perilaku. Hal ini diperkuat pendapat setiadi, dkk bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya

adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya.

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan (Kompas.com, 2020). Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Seperti perbedaan pendapat, pandangan, pemahaman, kepentingan, tujuan, atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik, dan lain sebagainya.

Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soerjono, Soekanto, 2006). Konflik tidak muncul dengan sendirinya tanpa suatu sebab, melainkan ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Konflik dapat muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan Negara (*vertical conflict*), dan konflik antar Negara (*interstate conflict*).

Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-masing. Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial, dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi.

Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun fungsi negative. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik pula bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat, tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan dampak buruk hingga timbul berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non fisik,

ketidakamanan, ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Berdasarkan teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Selain itu teori konflik beranggapan bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas golongan yang berkuasa (Irwandi dan Endah R. Chotim, 2017).

Berbagai konflik tersebut terus terjadi pada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan, dan pemusuhan diantara kelompok yang berbeda. Seperti halnya konflik yang terjadi di desa Wonosari. Konflik ini muncul ketika musim hujan atau musim tanam tiba, sehingga penulis mengambil judul “Analisis Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah Desa di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur”.

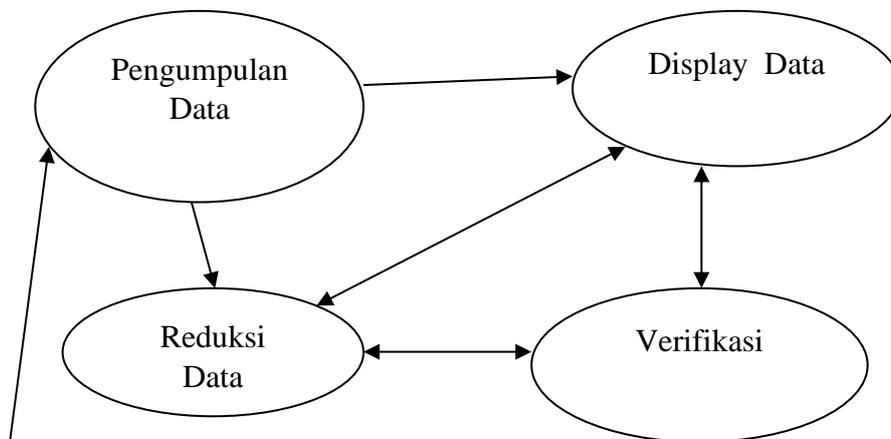
Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menggali suatu permasalahan secara alami dan mendalam dengan menggunakan metode telaah informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Metode harus mampu menjabarkan permasalahan secara sistematis dan saling melengkapi. Pendekatan ini menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaran suatu masalah dalam bentuk data-data deskriptif dengan mengedepankan kualitas analisisnya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan mengeksplorasi ketergantungan suatu kelompok/ golongan terhadap sektor kehidupan kelompok/ golongan yang lain melalui batasan terperinci, pengambilan data terhadap sumber informasi dilakukan langsung secara mendalam. Pembatasan penelitian dilakukan berdasarkan waktu, tempat, resiko dan kemampuan peneliti dalam bidang finansial. Studi deskriptif yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah pola integrasi pada masyarakat majemuk di kecamatan Kotagajah dan sekitarnya. Penelitian ini difokuskan pada proses asimilasi dan akulturasi berbagai bidang kehidupan dan ketergantungan sosial antar masyarakat di kecamatan Kotagajah yang dijadikan perekat integrasi dalam kemajemukan hidup bermasyarakat.

Pencarian dan pengambilan data difokuskan pada data kualitatif dengan cara penelitian lapangan dan kepustakaan. Di lapangan metode pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber yang sah dan relevan melalui bahan tertulis. Pada pendekatan ini,

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell dalam Arkandito, dkk., 2016). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Metode analisis yang digunakan yaitu melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya reduksi data untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data tentang, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari pengumpulan data di lapangan agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka data harus dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman.



Gambar 3.1 Analisis data model interaktif (Miles and Huberman, 1992)

Model analisis interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dilakukan untuk menilai keabsahan data dan pengerucutan atas jawaban pertanyaan penelitian.

Hasil dan pembahasan

Integrasi dan konflik merupakan dua proses yang saling bertentangan namun sangat erat kaitannya satu sama lain, integrasi merujuk pada arah persatuan sedangkan sebaliknya konflik merujuk pada arah perpecahan. Integrasi terjadi bila interaksi sosial dimasyarakat menjelma menjadi suatu pola ketergantungan antar kelompok/ golongan dalam masyarakat, Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, apabila semakin kecil ketergantungan ekonomi antar kelompok masyarakat, maka akan semakin besar potensi konflik yang terjadi. Menurut Wirawan (2013) selain bidang ekonomi masih banyak lagi bidang kehidupan yang dapat menjadi indikator terciptanya integrasi atau konflik antara lain perbedaan suku, ras, kelas/ kelompok sosial, kehidupan politik dan perbedaan agama.

Dalam proses konflik perlu dipetakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar ditemukan strategi penanganan yang efektif dan efisien. Wirawan menjabarkan pihak-pihak yang terlibat konflik antara lain:

1. Primer. Yaitu pihak-pihak yang langsung saling berhadapan/ berseteru. Mereka adalah aktor utama dalam sebuah konflik.
2. Sekunder, Yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat dalam akar permasalahan konflik, namun ikut membantu pihak-pihak primer dan berseteru secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pihak ketiga. Yaitu pihak-pihak yang memboncengi kepentingan pihak primer dan sekunder. Mereka tidak terlibat langsung dalam konflik, namun biasanya lebih banyak dibelakang layar. Dalam arti positif pihak-pihak ini menawarkan solusi penanganan konflik, sedangkan dalam arti negatif mereka memperkeruh keadaan (provokator) (Susanto, 2006)

Desa Wonosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Desa Wonosari terbentuk pada awal tahun 1942. Nama Wonosari berasal dari kata “Wono” yang berarti “Alas atau Hutan”, dan kata “Sari” yang berarti “Inti”. Dengan demikian Wonosari berarti “Inti dari Hutan”, hal ini karena pada waktu itu penduduknya memanfaatkan lahan hutan yang diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu juga ada dasar yang dipakai untuk memberi nama “Wonosari” pada desa ini yaitu karena penduduknya yang datang pertama kali di desa ini berasal dari daerah Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Pemberian nama desa ini juga atas kesepakatan para tokoh pada waktu itu.

Desa Wonosari merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Hal ini disebabkan karena desa ini memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Lahan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan tersebut, desa Wonosari mendapatkan bantuan dana untuk perbaikan saluran air. Namun, hal tersebut justru menimbulkan konflik dimasyarakat. Perbaikan saluran air ini dianggap mengganggu aktivitas pertanian masyarakat disaat musim tanam tiba. Padahal, perbaikan saluran air ini dilakukan agar air mengalir dengan lancar dan warga yang ingin menanam padi tidak berebut air.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa warga, dapat disimpulkan bahwa protes yang dilakukan oleh warga karena sangat kecewa dengan pemerintah desa yang mengalokasikan dana tersebut tidak tepat waktu dan perbaikan saluran air ini bersamaan dengan musim tanam tiba. Warga menganggap bahwa kewenangan yang dilakukan desa ini bisa berdampak buruk bagi keberlangsungan aktivitas pertanian. Jika

perbaikan saluran air ini tetap dilanjutkan maka otomatis air yang mengalir akan ditahan (dibendung) selama proses perbaikan dan itu mengakibatkan warga berhenti tanam.

Pendapat dan pertentangan ini kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Dalam hal ini peran pemerintah desa sangat penting. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soerjono Soekanto, 2002). Peran adalah fungsi, kedudukan, dan bagian kedudukan.

Berdasarkan UU Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7, tugas dan kewenangan desa yaitu mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Salah satu tugas dan wewenang kepala desa adalah mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Terkait dengan konflik yang terjadi di masyarakat, dalam pertemuan kader dan pamong desa di desa Wonosari, Bapak Kepala Desa menjelaskan bahwa perbaikan saluran air ini bukan serta merta atas kehendak pemerintah desa tetapi di akhir tahun 2020 ini desa Wonosari mendapatkan dan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki saluran air sepanjang 100 m. Oleh karena itu, Kepala Desa memutuskan dana tersebut di jatuhkan di saluran air dusun II desa Wonosari.

Bapak Kepala Desa dan segenap pemerintah desa lainnya berpendapat bahwa di akhir tahun ini memang air yang mengalir tidak lancar karena ada pergiliran kegiatan tanam padi. Perbaikan saluran air ini di jatuhkan di dusun II karena saluran airnya sudah rusak parah dan air yang mengalir tidak lancar serta mengakibatkan air mengalir kemana-mana. Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik ini harus ditangani secara maksimal. Konflik ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi bagi masyarakat. Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi dimana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokan utama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Resolusi konflik memiliki tujuan agar mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif.

Pierre sebagaimana dibahas oleh Nasikun (2006) berpendapat bahwa konflik merupakan bagian dari karakteristik yang menjadi sifat dasar sebuah masyarakat majemuk, yaitu sebagai berikut :

- a. Terjadinya segmentasi golongan, dimana setiap golongan memiliki tata adat dan budaya yang berbeda satu sama lain.
- b. Memiliki struktur sosial yang berdiri sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain
- c. Tidak mencari pembenaran atas adat dan budayanya sehingga bersifat toleran satu dengan yang lain.
- d. Walaupun kecil, konflik sering terjadi sebagai akibat persinggungan kepentingan
- e. Perlu adanya paksaan untuk mewujudkan integrasi
- f. Biasanya terjadi saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi
- g. Kelompok atau golongan yang memiliki basis massa paling besar cenderung mendominasi kelompok-kelompok yang lain.

Masyarakat majemuk memiliki karakteristik yang ketat tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmenter, oleh karena itu, Pierre penggolongan masyarakat untuk dikatakan sebagai masyarakat majemuk harus didasarkan tingkat perbedaan yang tinggi. Adapun kemajemukan masyarakat Lampung Khususnya di kecamatan Kotagajah dan sekitarnya didasarkan pada ras, suku bangsa, agama, bahasa, profesi, dan budaya.

Menurut Nasikun (1993), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan seperti negoisasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Wonosari ini dilakukan negoisasi. Negoisasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negoisasi juga diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang diperkara. Negoisasi juga merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

Konflik yang didominasi oleh prasangka sosial yang berkepanjangan dan telah mendarah daging akan menjadi dendam yang tak kunjung selesai, sehingga hanya karena masalah kecil dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal yang lebih luas. Keadaan ini tentu perlu resolusi konflik yang efektif agar akar permasalahan dapat diredam. Setidaknya ada empat tahapan dalam resolusi konflik, sebagai berikut:

1. Tahap de-eskalasi konflik yang menekankan pada proses penghentian kekerasan secara paksa, biasanya aparat keamanan atau militer yang akan paling berperan.
2. Tahap negoisasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan kelompok-kelompok yang bertikai untuk bermusyawarah menyelesaikan pertikaian.
3. Tahap problem solving approach yang lebih bernuansa sosial .

Tahap problem solving approach dijabarkan menjadi empat komponen yaitu: pertama, masing-masing pihak mengakui legitimasi pihaklain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Kedua, masing-masing pihak memberi informasi yang benar tentang konflik yang sedang terjadi meliputi penyebab, trauma yang timbul, hambatan struktural yang mungkin dihadapi dalam resolusi konflik. Ketiga, kedua belah mulai mencari alternatif solusi setidaknya signal-signal menuju perdamaian. Keempat, problem solving workshop yakni kesediaan pihak-pihak untuk menyediakan suasana kondusif bagi resolusi konflik. (4) Tahap peace building, yakni tahap yang bersifat kultural dan struktural. Memerlukan waktu yang panjang dan konsistensi untuk mewujudkan perdamaian yang permanen.

Pemetaan pihak-pihak yang berkonflik akan membantu penyelesaian konflik secara cepat. Pihak-pihak primer merupakan pihak pertama yang perlu ditangani dan didudukkan bersama dalam suatu musyawarah dengan ditengahi pihak ketiga, karena ditangan merekalah akar masalahnya. Dengan damainya pihak-pihak primer maka secara otomatis pihak-pihak sekunder akan turut berdamai karena mereka pada hakekatnya hanya melakukan azas perbantuan. Pasca perdamaian, perlu diwaspadai provokator yang berkepentingan agar konflik terulang kembali.

Pendekatan persuasif harus dikedepankan dalam rangka mencapai integrasi dan menangani konflik. Menghentikan konflik dengan pemaksaan oleh alat negara yang berwenang (Peace Keeping) yang kemudian diterapkannya serangkaian aturan beserta sanksinya agar konflik tidak terulang kembali, hanya efektif untuk menghentikan konflik dalam waktu singkat tapi tidak akan menjamin konflik akan reda dalam kurun waktu yang lama.

Dalam negoisasi yang dilakukan di desa Wonosari ini, diadakan pertemuan antara pemerintah desa dan kader juga pamong desa. Pemerintah desa menjelaskan bahwa dialokasinyana dana tersebut supaya warga masyarakat tidak berpikir jika dana tersebut digunakan secara pribadi oleh pemerintah desa. Bapak Kepala Desa juga menjelaskan bahwa perbaikan saluran ini dilakukan agar air mengalir dengan lancar sehingga kegiatan pertanian dan perkebunan juga berjalan lancar. Selanjutnya dari berbagai penjelasan dari pemerintah desa tersebut, kader dan pamong desa menjelaskan kepada masyarakat.

Dari berbagai penjelasan yang disampaikan oleh kader dan pamong desa, masyarakat sedikit demi sedikit mulai memahami maksud pemerintah desa dan protes pun juga sudah mulai meredam. Saat ini pun juga sudah menerima perbaikan saluran air dan mulai beraktivitas seperti semula yaitu bercocok tanam.

Simpulan

Konflik yang terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Wonosari dilatarbelakangi oleh berbagai factor seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya komunikasi, dan kurangnya keterbukaan antara pemerintah desa kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk resolusi konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat yaitu melakukan negoisasi. Pada proses negoisasi ini pemerintah desa menyampaikan dan menjelaskan secara jelas dan mendalam tentang perbaikan saluran air tersebut yang disampaikan kepada kader serta pamong desa, kemudian kader dan pamong desa ini menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat. Proses integrasi membutuhkan pengakuan hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga antar individu atau kelompok bisa saling menerima perbedaan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk menyamakan tujuan hidup bermasyarakat. Apabila hal itu diabaikan maka konfliklah yang akan terjadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa disintegrasi bangsa sebagai akibat konflik bernuansa SARA merupakan ancaman terbesar Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

Referensi

- A, W Gerungan, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Eresco, 1988.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Penerapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Arkandito, Gregorius Fendi, dkk. 2016. *Jurnal Manajemen Komunikasi Vol. 1 No. 1*.
<https://jurnal.unpad.ac.id>. Diunduh pada 16 Desember 2020.
- Creswell, J.W, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, New Jersey: Pearson Education, 2008.
<http://referensi.data.kemdikbud.go.id> diakses 16 Agustus 2016
- <http://regional.kompas.com/read/2015/02/09/1721466> diakses 18 April 2016.
- <http://www.tulangbawangbaratkab.go.id/?page=konten&&no=1> diakses tanggal 13 Januari 2017
- <https://tulangbawangbaratkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8> pada tanggal 11 Januari 2017
- <https://www.kompas.com>. Diunduh pada 16 Desember 2020.
- Irwandi dan Endah R. Chotim. 2017. *JISPO Vol. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017*.
<https://journal.uinsgd.ac.id>. Diunduh pada 16 Desember 2020.
- Kementerian Agama Provinsi Lampung, *Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka (Data Statistik Keagamaan Tahun 2015)*, Lampung: Kanwil Kemenag, 2016.

- Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 129a/u/2004 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan*
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Lawang, Robert, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1994
- Maryati, Kun dan Juju Seryawati, *Sosiologi*, Jakarta: Eksis, 2006
- Maryati, Kun, *Sosiologi untuk SMA Kelas XI*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Miles, Matthew BA and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Monografi kecamatan Kotagajah tahun 2010
- Narwoko J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja.
- polri.go.id/berita/15831 diakses tanggal 17 April 2016
- Rozi, Syafuan.dkk, *Kekerasan Komunal: Anantomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sa. Sabaruddin, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatun*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Setiadi Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sondang P. Siagian. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2010.
- Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Undang-Undang Peratutan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi: Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat untuk SMA/MA kelas X*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Warnaen, Suwarsih, *Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multi Etnis*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wulansari, Dewi, 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*, Jakarta: PT Refika Aditama.